

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional sangat berkaitan dengan adanya peran pada ekonomi daerah. Dalam mewujudkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai, daerah disokong dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, menurut Alhusain, *et al.* (2018 : 8) penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menciptakan terobosan baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia yang juga beriringan dengan perubahan pada kehidupan masyarakat sehingga harapannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah karena pemerintah daerah dapat mengurus setiap daerahnya masing-masing. Kebijakan otonomi daerah yang merupakan perwujudan

dari kemandirian daerah menjadi salah satu peluang untuk mengelola kekayaan keuangan daerahnya sendiri tanpa memberikan beban kepada pemerintah pusat. Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Nordiawan (2012 : 1) tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Maka, tonggak utama dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai pelaksanaan otonomi daerah dilihat pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sudaryo (2017 : 9) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tugas bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengelola keuangan di setiap daerah di Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kendala pada pelaksanaan otonomi daerah sering terjadi pada pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki kendala yang bervariasi dalam mengatur kinerja keuangannya. Masalah yang kerap terjadi pada pemrosotan kinerja keuangan adalah pos anggaran masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dan sistem penyerapan anggaran yang rendah dan tidak optimal, (Hasibuan. 2021. <https://bisnis.com>, 5 November 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai yang mendominasi belanja daerah ini membuktikan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal yang mengakibatkan pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi terhambat.

Fenomena yang terjadi juga tidak terlepas dari daerah yang belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan PAD dapat mencukupi kebutuhan anggaran belanja, pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya sebagai bentuk mengoptimalkan otonomi daerah. PAD tidak hanya bermanfaat untuk pendanaan segala kegiatan Pemerintah Daerah serta pelayanan masyarakat. Namun, PAD juga sebagai tolok ukur dari keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat atau yang disebut dana perimbangan yang berasal dari APBN untuk menutupi anggaran belanja daerahnya. Porsi PAD yang tinggi dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan mengindikasikan adanya kemandirian daerah dalam mengatur kualitas anggaran dan mengelola potensi daerah yang ada sehingga terjadinya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan PAD yang baik tidak akan terlepas dari kinerja para perangkat pemerintah daerah, maka adanya belanja pegawai pada pengeluaran belanja daerah merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kerjanya. Menurut Pratiwi (2016) semakin besar belanja

pegawai maka semakin besar belanja operasi dan pemeliharaan sarana publik yang diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal ini dikarenakan semakin tinggi PAD yang diperoleh akan meningkatkan sumber pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk melaksanakan kewenangannya dalam menggali potensi sumber daya unggul daerah yang dimiliki.

Hal tersebut akan memicu peningkatan alokasi belanja pegawai dikarenakan jumlah pegawai pemerintahan yang semakin meningkat. Dengan harapan, jumlah pegawai yang meningkat dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Maka pengelolaan PAD yang baik tidak terlepas dari kinerja para perangkat pemerintah daerah yang secara tidak langsung, PAD memiliki kaitannya dengan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena jumlah pengeluaran untuk alokasi belanja pegawai ini akan membebani keuangan daerah.

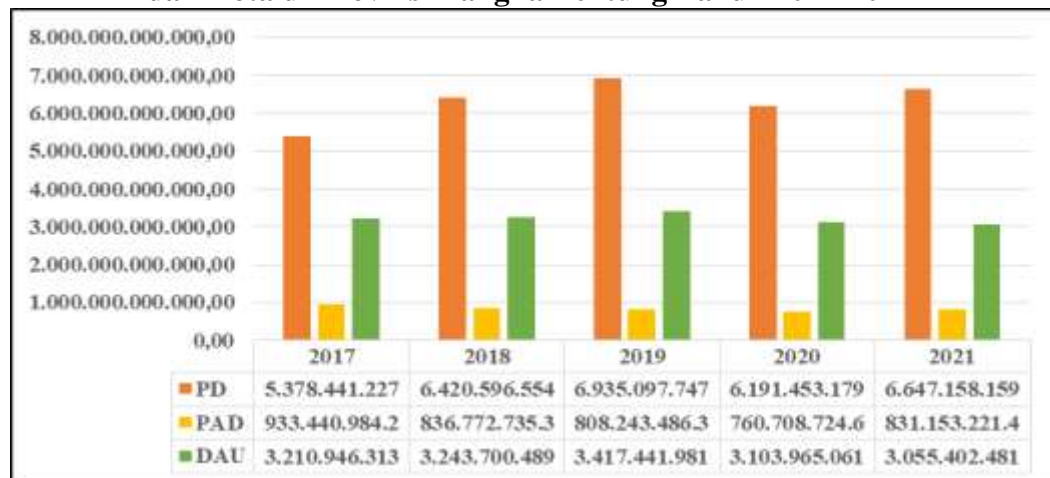
Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dana perimbangan yang menjadi sorotan tidak kalah penting dalam faktor kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Nordiawan (2012 : 56), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Permasalahan dalam implementasinya, DAU banyak terserap di belanja pegawai yang menjadi hal krusial di daerah, (Yudartha. 2015. <https://kompasiana.com>. 5 November 2022). Belanja

pegawai pada tingkat provinsi rata-rata mencapai 27 persen. Belanja pegawai pada 14 provinsi mengalokasikan penggunaannya sudah di bawah rata-rata yaitu 27 persen, namun mayoritas pada provinsi lain masih mengalokasikan penggunaannya diatas rata-rata yang mencapai sebesar 27,6 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen yang artinya sangat melebihi rata-rata penggunaan belanja pegawai pada tingkat provinsi. APBD yang digunakan oleh Provinsi Bangka Belitung sebagian besar hanya untuk belanja pegawai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengimbau daerah dengan belanja pegawai paling tinggi segera mengalihkan anggaran ke belanja produktif dan belanja modal. (Ulya. 2021. <https://money.kompas.com>, 5 November 2022). Fenomena belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemekaran daerah ini, menambah pengeluaran daerah terutama alokasi belanja pegawai yang berasal dari DAU. Dapat disimpulkan bahwa transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU dan belanja pegawai memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tuntutan kebutuhan untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang seharusnya merupakan urgensi pemerintah daerah menjadi hilang arah karena kebutuhan belanja pegawai yang ada. Ketidakefektifan dalam pemanfaatan DAU serta tidak mementingkan hasil dan dampak dari DAU yang seharusnya belanja modal lebih besar digunakan untuk kepentingan publik dibandingkan belanja pegawai mengimplikasi pada tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang menurun.

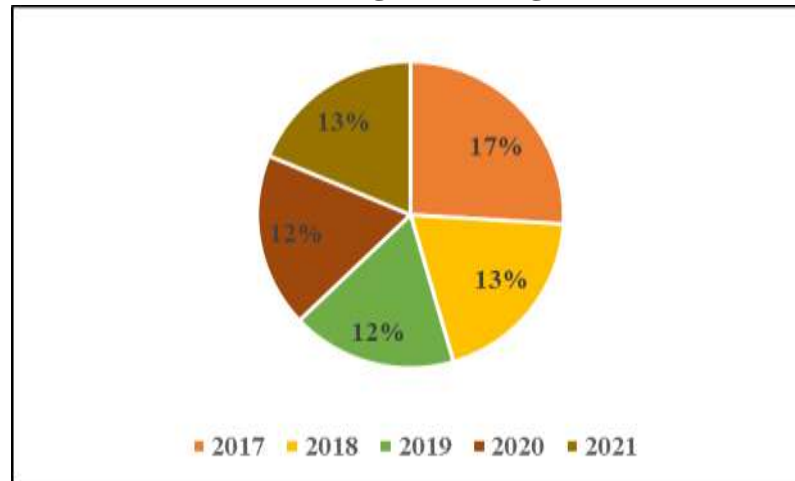
Pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan melihat nilai anggaran pada APBD dan nilai realisasi pada APBD. Setiap daerah memiliki kinerja keuangan yang berbeda tergantung pada pengelolaan keuangan daerahnya seperti halnya pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri, (Sani. 2017. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>. 5 November 2022).

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah, PAD, dan DAU Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021



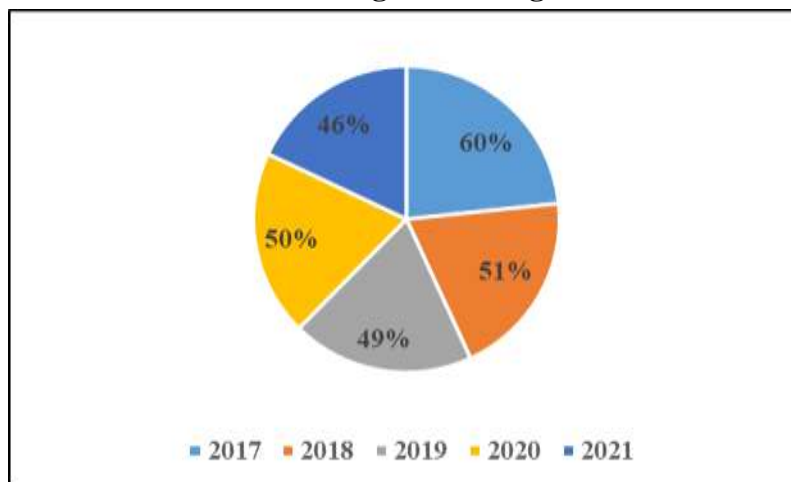
Sumber Data: LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung

Gambar 1.2
Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021



Sumber Data: LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung

Gambar 1.3
Realisasi DAU terhadap Pendapatan Daerah Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021



Sumber Data: LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan data grafik di atas dapat diketahui bahwa dari total pendapatan daerah yang ada, DAU memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan PAD.

Pada tahun 2017 sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD hanya memiliki porsi sebesar 17 persen dari total pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2018 memiliki porsi nilai yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13 persen dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 porsi nilai PAD kian menurun dari tahun sebelumnya dan tetap pada porsi nilai tersebut pada tahun 2020 yaitu sebesar 12 persen. Lalu, pada tahun 2021 porsi PAD mengalami sedikit peningkatan menjadi 13 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari kemandirian daerah masih belum memadai.

Dapat dilihat dari data grafik di atas bahwa Bangka Belitung pada tahun 2017-2021 masih bergantung pada dana transfer dari pusat yaitu DAU. Porsi nilai DAU pada tahun 2017 cukup memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah yaitu sebesar 60 persen yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 51 persen dan tahun 2019 sebesar 49 persen. Sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan 1 persen menjadi 50 persen. Lalu, pada tahun 2021 porsi DAU mengalami penurunan sebesar 46 persen dari total pendapatan daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ini masih perlu dilakukan evaluasi dikarenakan pengurangan DAU berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang menurun. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerah yang ada serta mengalokasikan sumber pendapatannya dengan efektif dan efisien sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Putri (2019) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, menurut Sari (2019) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam studi empiris pada Provinsi Banten periode 2013-2016 menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian *leverage* tidak berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan Sari dan Halmawati (2021) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, dan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan Akbar, *et al.* (2016) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai menunjukkan hasil bahwa PAD, DBH, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai

sedangkan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Menurut Prasetyo (2014) yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, SiLPA, dan jumlah pegawai terhadap alokasi belanja pegawai menyimpulkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai, sedangkan hasil analisis SiLPA dan jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.

Dalam sudut pandang Islam, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh para perangkat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan amanah yang diperoleh dari masyarakat. Hal ini seperti firman Allah SWT:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ

Artinya: “Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna”. (Q.S An-Najm (53) : 39-41)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa balasan yang akan diterima oleh manusia sesuai dengan yang telah diusahakannya. Apabila para perangkat pemerintah daerah melaksanakan kinerjanya sesuai dengan usaha dan amanah yang diperoleh dari masyarakat maka Allah SWT menjanjikan balasan yang paling sempurna.

Dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya kaidah fiqh muamalah. Berdasarkan kaidah fiqh muamalah terdapat prinsip yang

sesuai dengan pelaksanaan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu intervensi negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya. Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya saja sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya (Habibullah, 2018). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ لِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr (59) : 7)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Pegawai sebagai Variabel Intervening dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
4. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
5. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?
7. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung?

8. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Pegawai pada tinjauannya dalam sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
4. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
5. Untuk mengetahui apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.

6. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai sebagai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
7. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.
8. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja Pegawai pada tinjauannya dalam sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dari segi faktor Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum melalui Belanja Pegawai sebagai variabel *intervening* pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai sebagai variabel *intervening* pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kaitan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai sebagai variabel *intervening* sehingga masyarakat dapat aktif untuk mengetahui informasi kinerja dari pemerintah setempat.